



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ENY DWI SURYANI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
3. NHK : 801727

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.309.500.000**

1. Tanah Seluas 1583 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 791.500.000
2. Tanah Seluas 496 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 248.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 363 m2/198 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 408.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0.G A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 42.205.000**

**D. SURAT BERHARGA**

**Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

**Rp. 844.339.869**

**F. HARTA LAINNYA**

**Rp. ----**

**Sub Total**

**Rp. 3.604.044.869**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.604.044.869

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.